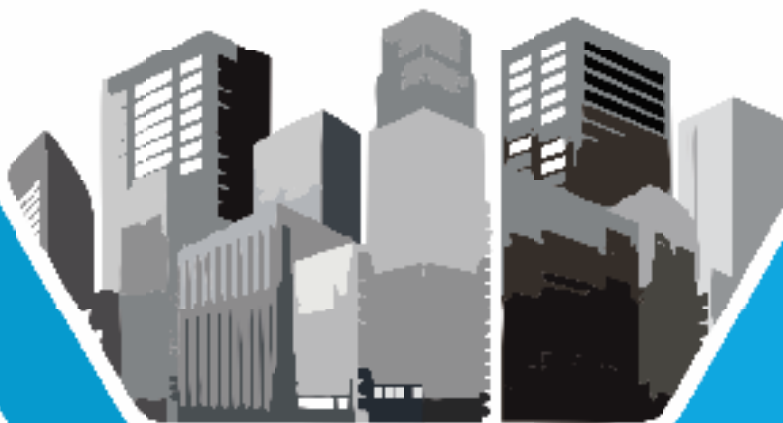




LKjIP 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan implementasi pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2019.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kamipun masih menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan bimbingan taufiq dan hidayah-Nya serta perlindungan kepada kita semua, sehingga tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak kita selalu dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pangkalan Bun, Pebruari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. GUSTEM. IMANSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19620412 198503 1 028



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, d a l a m penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada sisa tahun Renstra.

Pada tahun 2019 ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 4 (empat) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan adalah 96,72 %. Beberapa sasaran itu adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Dibidang Administrasi Kependudukan	86,90 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan	79,57	Tinggi



3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	93,67	Sangat Tinggi
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	C	Sedang

Secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 7.934.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.430.029.314,00 atau 93,64 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 2 (dua) sasaran strategis adalah Rp. 419.340.000,00 dengan realisasi pembiayaan sasaran sebesar Rp. 396.796.823,00 atau 94,62% dan kegiatan penunjang 2 (dua) sasaran sebesar Rp. 2.371.029.000,00 dengan realisasi pembiayaan sasaran penunjang sebesar Rp. 1.924.358.142,00 atau 81,16%.

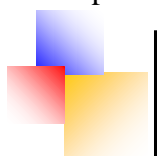
Demikian yang dapat disampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini, semoga dengan LKjIP ini menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas.



DAFTAR ISI

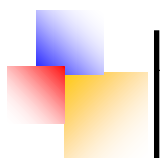
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum Perangkat Daerah.....	3
C. Aspek Strategis Perangkat Daerah	4
D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah	4
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
1. Tujuan	7
2. Sasaran	7
B. Indikator Kinerja Utama.....	7
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	8
D. Perjanjian Kinerja (PK).....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	12
1. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017....	16
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perangkat Daerah.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	30

Lampiran – lampiran.



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama	8
Tabel II.2 Rencana Kinerja Tahunan.....	8
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Sasaran 1	9
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Sasaran 2.....	9
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Sasaran 3	9
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Sasaran 4.....	10
Tabel III.1. Skala Nilai Peningkatan Kinerja	11
Tabel III.2. Capaian Kinerja Sasaran.....	12
Tabel III.3. Capaian Kinerja Sasaran 1.....	13
Tabel III.4. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 1	13
Tabel III.5. Capaian Kinerja Sasaran 2.....	13
Tabel III.6. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 2	14
Tabel III.7. Capaian Kinerja Sasaran 3.....	14
Tabel III.8. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 3	15
Tabel III.9. Capaian Kinerja Sasaran 4.....	15
Tabel III.10. Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 4	16
Tabel III.11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 1	16
Tabel III. 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 2	17
Tabel III. 13. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 3	17
Tabel III. 14. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 4	18
Tabel III. 15. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 1	19
Tabel III.16. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 2	20
Tabel III.17. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 3	20
Tabel III.18. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 4	20
Tabel III.19. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019.....	22
Tabel III.21. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Langsung Tahun 2019	25
Tabel III.22. Keberhasilan Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 1.....	25
Tabel III.23. Keberhasilan Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 2.....	26
Tabel III.24. Keberhasilan Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 3.....	26
Tabel III.24. Keberhasilan Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 3.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu dari 38 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mencapai pelayanan yang profesional terhadap peristiwa-peristiwa kependudukan yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok fungsi pemberian perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dengan ditetapkannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar Hukum :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 14);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
- k. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan pelaksanaan program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

B. Data Umum Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 tahun 2017 pasal 3 bahwa : Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.



- c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - 3. Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
- d. Bidang Pemanfaatan data dan Informasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.

C. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Posisi strategis organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai pemegang policy/kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi :

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

D. Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Persoalan pokok yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- 1. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai.
 - b. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang.
 - c. Jumlah pegawai untuk pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan masih kurang dan.
 - d. Pencatat buku register akta Pencatatan Sipil masih kurang.



2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan dokumen legal yang dimiliki;
3. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran, masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;
4. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
5. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk perangkat KTP Elektronik masih kurang banyak karena jumlah peralatan yang tersedia masih sedikit sehingga menghambat proses penyelesaian pencetakan KTP Elektronik;
6. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya.

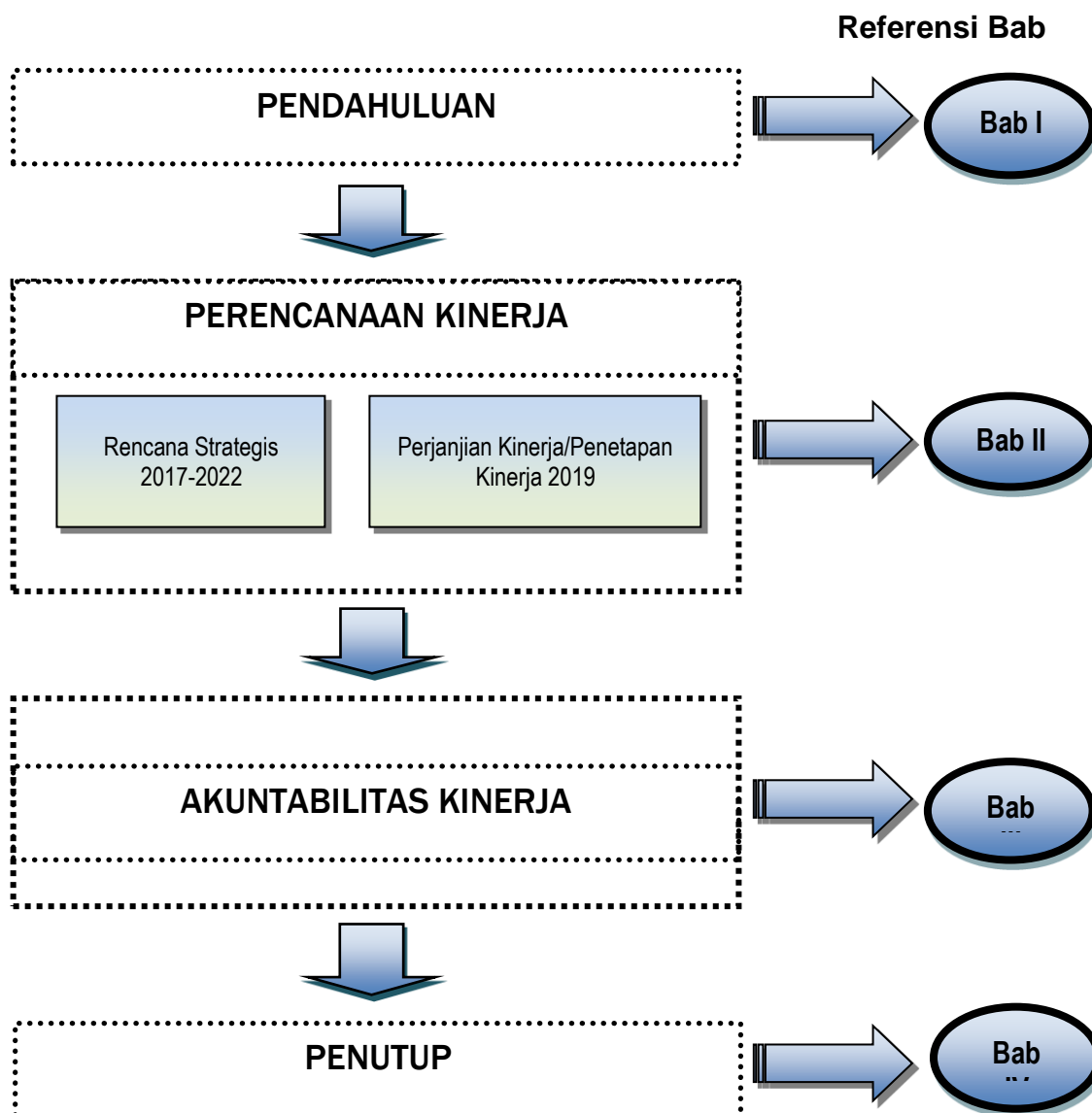
E. Sistematika Penyajian

LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan analisis seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam Gambar berikut:



Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

➤ *Memenuhi hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi Kependudukan;*

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. *Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Dibidang Administrasi Kependudukan;*
- b. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan.*

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/14/DUK-CAPIL/2019 tanggal 4 Januari 2019 yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :



Tabel II.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Jenis Data	Sumber Data
1	2	3	4	6
Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Di Bidang Administrasi Kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk	Jumlah penduduk pada wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki KTP-el dengan perekaman sidik jari dibagi jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP) dikali 100%	- Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dengan perekaman sidik jari - Jumlah penduduk sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah/pernah menikah (wajib KTP)	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan semester, Laporan Tahunan dan Laporan DAK Sem
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Adminduk	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat dibagi jumlah responden	- Formulir Survei kepuasan masyarkat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat berisi program-program maupun kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena Rencana Kinerja Tahunan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan dan RAPBD serta sebagai acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan data yang diambil ialah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) serta data lain yang berkaitan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja serta Target dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dirinci pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk	76,75%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	86%
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A

D. Perjanjian Kinerja

Dalam penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi Kependudukan*

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh penduduk	76,75 %	Program Penataan Administrasi Kependudukan	263.289.000,00
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	39.000.000,00
		Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	70.758.000,00

Sasaran 2 : *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kependudukan*

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	46.293.000,00

Sasaran 3 : *Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	86 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.818.991.400,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	336.257.600,00
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.780.000,00

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.000.000,00
--	--	--	----------------

Sasaran 4 : *Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah*

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000,00

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran 1.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

LKjIP 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukurannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Nilai Pencapaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
I	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
II	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi
III	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang
IV	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah
V	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah



A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Sangat Tinggi” dengan nilai 96,72 % dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Dibidang Administrasi Kependudukan	88,99 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan	79,57	Tinggi
3	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	93,67	Sangat Tinggi
4	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	C	Sedang

Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

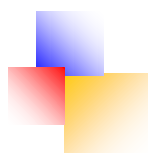
1. Perbandingan antara Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja bidang kependudukan adalah :

Sasaran 1:

Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan” diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :



Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el)	%	76,75	66,70	86,90
2	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	%	85	84,62	99,55
3	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri	Rasio	1.100	1.317	83,52
Capaian Kinerja Sasaran					89,99

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan” adalah sebesar 89,99% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”.

Sebagai penunjang keberhasilan program/kegiatan ataupun kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 1

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el)	263.289.000,00	242.298.823,00	92.03
Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	39.000.000,00	38.605.000,00	98.99
Rasio jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri	70.758.000,00	70.750.000,00	99.99
Capaian Kinerja Keuangan			97,13

Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	79,57	88,41

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan” adalah sebesar 88,41% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6

Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 2

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	46.293.000,00	45.143.000,00	97,51
Capaian Kinerja Keuangan			97,51

Sasaran 3:

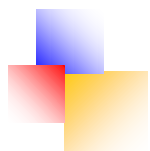
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*” diukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7

Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	86	76,92	89,44
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	86	97,87	113,80%
3	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	90	89,35	99,28%
4	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%	84	98,82	117,64%
5	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	%	84	88,62	105,50%
Capaian Sasaran					105,13%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “*Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi*” adalah sebesar 105,13 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 3

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1.818.991.400,00	1.399.190.024,00	76,92
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	336.257.600,00	329.106.348,00	97,87
Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000,00	7.147.741,00	89,35
Tingkat Kepatuhan Aparatur	46.780.000,00	46.230.000,00	98,82
Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	161.000.000,00	142.684.029,00	88,62
Capaian Kinerja Keuangan			90,32

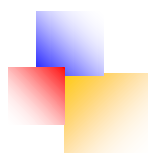
Sasaran 4:

Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “*Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.9
Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	C	Sedang
Capaian Sasaran					Sedang



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah” masuk dalam kategori capaian “Sedang”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.10
Capaian Kinerja Keuangan Sasaran 4

Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.147.741,00	89,34
Capaian Kinerja Keuangan			89,34

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017

Untuk mengetahui adanya capaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017, 2018 dan 2019 maka dapat dilihat sesuai sasaran yang ditentukan sebagai berikut :

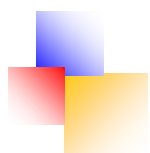
Sasaran 1:

Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el)	Realisasi	KTP el	158.546	175.796	176.688
		Capaian	%	82,67	100,10	99,40
2	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	Realisasi	Akta Kelahiran	171.896	185.409	92.969
		Capaian	%	63,70	74,53	84,62
3	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri	Realisasi	Nilai	N/A	1.287	1.317
		Capaian	%	N/A	97,13	83,52



Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Realisasi	Nilai	N/A	73,667	79,57
		Capaian	Nilai	N/A	86,66	88,41

Sasaran 3:

Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Realisasi	%	N/A	96,40	76,92
		Capaian	%	N/A	114,76	89,44
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi	%	N/A	89,53	97,87
		Capaian	%	N/A	106,58	113,80
3	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Realisasi	%	N/A	100	89,35
		Capaian	%	N/A	113,64	99,28
4	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Realisasi	%	N/A	100,00	98,82
		Capaian	%	N/A	125,00	117,64
5	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	Realisasi	%	N/A	88,89	88,62
		Capaian	%	N/A	111,11	105,50

Sasaran 4:

Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :



Tabel III.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Realisasi	%	N/A	100	89,35
		Capaian	%	N/A	113,64	99,28

Berdasarkan tabel diatas penyebab peningkatan/penurunan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan maksud dan tujuan program adalah “terpenuhinya hak-hak sipil penduduk dibidang administrasi kependudukan” dengan hasil meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 260.302.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 239.888.300,- atau 92,16% realisasi fisik sebesar 100%.

- 1) Kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dilaksanakan melalui kegiatan antara lain belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap sebanyak tiga orang selama satu tahun anggaran, cetak formulir permohonan KK, cetak blanko tanda bukti pengambilan KK, KIA, Akta Kelahiran, dengan hasil kelancaran sistem dan data administrasi kependudukan dengan baik dan lancar serta tersedia blanko dan formulir dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.179.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp.115.895.300,- atau 98,90% realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) dilaksanakan melalui belanja pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan Pagu Rp. 5.720.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 5.720.000,- atau 100% realisasi fisik sebesar 100%.
- 3) Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan dilaksanakan melalui belanja cetak buku data agregat kependudukan semester I dan Semester II, Cetak Buku Profil Kependudukan untuk dokumentasi data kependudukan selama satu tahun pada bidang data dan informasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.850.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 43.700.000,- atau 97,43% realisasi fisik sebesar 100%.
- 4) Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (Survei Kepuasan Masyarakat) dilaksanakan dengan kegiatan belanja penggandaan bahan



dan laporan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan sebagai bahan perbaikan kinerja dan pengambilan keputusan lebih lanjut, dengan hasil tersedia Laporan Survei Kepuasan masyarakat per semester dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.443.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 1.443.000,- atau 100% realisasi fisik sebesar 100%.

- 5) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dilaksanakan melalui sosialisasi dengan stake holder (pihak desa, kecamatan, SKPD, organisasi kemasyarakatan) pengguna pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kegiatan belanja bahan pelatihan, belanja publikasi kegiatan sosialisasi, belanja dekorasi, cetak spanduk dan buku panduan, penggandaan materi, sewa tempat, makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi, perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi, belanja transport dan akomodasi narasumber, honorarium pembawa acara, narasumber, moderator, pembaca doa sebanyak 2 (dua) kali kegiatan sosialisasi dengan hasil tersosialisasinya kebijakan administrasi kependudukan kepada stake holder dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.110.000,- sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 73.130.000,- atau 80,26% realisasi fisik sebesar 100%. Capaian tersebut masih rendah (dibawah 85 %) disebabkan pembayaran transport / akomodasi narasumber diamprah sesuai dengan bukti pengeluaran (ad cost) yang dilampirkan oleh narasumber.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

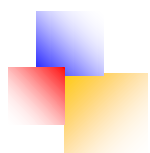
Sasaran 1:

Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan.

Tabel III.15

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el)	100%	69,49%	76,75%	82,67%	100,10%	66,70%
2.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran)	80%	82,50%	85%	63,70%	74,78%	84,62%
4.	Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri	N/A	1.250	1.100	N/A	1.287	1.317



Sasaran 2:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan.

Tabel III.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat	N/A	87	90	74,66	73,67	79,57

Sasaran 3:

Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tabel III.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	N/A	84%	86%	N/A	96,40%	76,92%
2.	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	84%	86%	N/A	89,53%	97,87%
3.	Tingkat Kepatuhan Aparatur	N/A	80%	84%	N/A	100%	98,82%
4.	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	N/A	80%	84%	N/A	88,89%	88,62%

Sasaran 4:

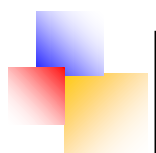
Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.18

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	A	N/A	N/A	C



Berdasarkan tabel diatas penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dimana Sasaran RPJMD menjadi indikator utama pada Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan. Kondisi pelayanan publik secara umum dapat dilihat dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Target indikator utama pada RPJMD ditentukan sebesar 90 sementara terealisasi 79,57 atau capaiannya 88,41%.

Capaian rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas layanan publik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target sasaran disebabkan oleh sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai seperti ruang tunggu yang masih kurang memadai dan pendingin ruangan yang tidak berfungsi. Adapun faktor eksternal yang menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adalah sering terjadi kekosongan blanko KTP-el yang menimbulkan kekecewaan masyarakat.

Pencapaian indikator pada tahun 2019 terdapat capaian yang tidak mencapai target yaitu presentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP-el) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya belum memenuhi target sasaran. Hal ini di karenakan oleh adanya kekosongan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Pemerintah Pusat. Untuk target terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pelayanan kemasyarakat langsung melalui kegiatan jemput bola dan ke sekolah-sekolah melaksanakan perekaman KTP-el untuk mendata penduduk pemula (baru berumur 17 tahun).

Presentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran) tidak mencapai target dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 karena untuk akta yang terbit sebelum adanya aplikasi SIAK (Akta Manual) tidak terdata dan terhitung dalam aplikasi SIAK serta pelayanan belum mampu menjangkau semua desa, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat mengurus akta kelahiran.

Rasio jumlah penduduk yang terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Data Agregat Kependudukan (DAK) Kemendagri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Rasio ini sebagai gambaran pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang memiliki data akurat sehingga mendekati data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun pada kenyataannya target yang telah ditentukan tidak

tercapai karena penambahan penduduk pada DAK Sem diikuti juga penambahan penduduk pada SIAK.

B. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2019 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.144.052.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.790.369.000,00. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran total sebesar Rp. 7.934.421.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.430.029.314,00 atau 93,64%.

Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2019 tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel III.19
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019

No. Urut	Uraian	Anggaran SETELAH PERUBAHAN	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0
	JUMLAH	0	0	0
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI	7.386.347.600,00	6.980.766.314,00	(405.581.286,00)
2.1.1	Belanja Pegawai	5.144.052.000,00	5.108.874.349,00	(35.177.651,00)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.242.295.600,00	1.871.891.965,00	(370.403.635,00)
2.2	BELANJA MODAL	548.073.400,00	449.263.000,00	(98.810.400,00)
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	548.073.400,00	449.263.000,00	(98.810.400,00)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	-
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-

2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	-
	JUMLAH BELANJA	7.934.421.000,00	7.430.029.314,00	504.391.686,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.934.421.000,00)	(7.430.029.314,00)	(504.391.686,00)

Tabel III.20
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Langsung tahun 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.06.2.06.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	2.790.369.000,00	2.321.154.965,00	469.214.035,00	83,18
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.818.991.400,00	1.399.190.024,00	419.801.376,00	76,92
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.500.000,00	108.858.298,00	16.641.702,00	86,73
2.06.2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.930.000,00	2.280.500,00	1.649.500,00	58,02
2.06.2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.262.000,00	131.313.326,00	8.948.674,00	93,62
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.768.000,00	52.512.900,00	20.255.100,00	72,16
2.06.2.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	538.048.000,00	263.902.000,00	274.146.000,00	49,04
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	149.480.000,00	148.730.000,00	750.000,00	99,49
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	424.073.400,00	328.163.000,00	95.910.400,00	77,38
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340.050.000,00	340.050.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336.257.600,00	329.106.348,00	7.151.252,00	97,87
2.06.2.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.000.000,00	121.100.000,00	3.900.000,00	96,88
2.06.2.06.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	161.197.600,00	159.250.000,00	1.947.600,00	98,79
2.06.2.06.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.500.000,00	34.282.698,00	1.217.302,00	96,57
2.06.2.06.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.560.000,00	14.473.650,00	86.350,00	99,40
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	46.780.000,00	46.230.000,00	550.000,00	98,82
2.06.2.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.680.000,00	23.550.000,00	130.000,00	99,45
2.06.2.06.01.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	23.100.000,00	22.680.000,00	420.000,00	98,18
2.06.2.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	161.000.000,00	142.684.029,00	18.315.971,00	88,62
2.06.2.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	161.000.000,00	142.684.029,00	18.315.971,00	88,62

2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,00	7.147.741,00	852.259,00	89,34
2.06.2.06.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	240.000,00	240.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.760.000,00	6.907.741,00	852.259,00	89,01
2.06.2.06.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	263.289.000,00	242.298.823,00	20.990.177,00	92,02
2.06.2.06.01.15.01	Pengembangan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	117.179.000,00	115.895.300,00	1.283.700,00	98,90
2.06.2.06.01.15.05	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	45.000.000,00	44.330.000,00	670.000,00	98,51
2.06.2.06.01.15.06	Pelatihan Tenaga Pelayanan Administrasi Kependudukan	10.000.000,00	8.943.523,00	1.056.477,00	89,43
2.06.2.06.01.15.07	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	91.110.000,00	73.130.000,00	17.980.000,00	80,26
2.06.2.06.01.16	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	39.000.000,00	38.605.000,00	395.000,00	98,98
2.06.2.06.01.16.02	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	39.000.000,00	38.605.000,00	395.000,00	98,98
2.06.2.06.01.17	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	46.293.000,00	45.143.000,00	1.150.000,00	97,51
2.06.2.06.01.17.02	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	44.850.000,00	43.700.000,00	1.150.000,00	97,43
2.06.2.06.01.17.04	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.18	Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	70.758.000,00	70.750.000,00	8.000,00	99,98
2.06.2.06.01.18.03	Pengembangan Sentral Data Kependudukan	55.038.000,00	55.030.000,00	8.000,00	99,98
2.06.2.06.01.18.05	Pelatihan Operator SIAK Terpadu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
2.06.2.06.01.18.07	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	100

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) No. 910/40/II/DPPA-SKPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola dana Belanja (Langsung dan Tidak Langsung) sebesar Rp. 7.934.421.000,00 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.144.052.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.108.874.349,00 atau 99,31% dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.790.369.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.321.154.965,00 atau 83,18%. Sampai akhir Desember 2019 Belanja daerah telah direalisasikan sebesar Rp. 7.430.029.314,00 atau sebesar 93,64%.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Dari seluruh kegiatan tersebut 9 (sembilan) kegiatan merupakan indikator sasaran dalam mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan



analisis capaian kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan*” diukur melalui 4 (empat) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.21
Keberhasilan Capaian Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
Belanja Langsung	373.047.000,00	351.653.823,00	94,27
Program Penataan Administrasi Kependudukan	263.289.000,00	242.298.823,00	92,02
Pengembangan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	117.179.000,00	115.895.300,00	98,90
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	45.000.000,00	44.330.000,00	98,51
Pelatihan Tenaga Pelayanan Administrasi Kependudukan	10.000.000,00	8.943.523,00	89,43
Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	91.110.000,00	73.130.000,00	80,26
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	39.000.000,00	38.605.000,00	98,98
Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	39.000.000,00	38.605.000,00	98,98
Program Pendataan dan Informasi Kependudukan	70.758.000,00	70.750.000,00	99,98
Pengembangan Sentral Data Kependudukan	55.038.000,00	55.030.000,00	99,98
Pelatihan Operator SIAK Terpadu	10.000.000,00	10.000.000,00	100
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	5.720.000,00	5.720.000,00	100
Capaian Kinerja Keuangan			94,27

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan*” diukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.22
Keberhasilan Capaian Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 2

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
Belanja Langsung	46.293.000,00	45.143.000,00	97,51
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	46.293.000,00	45.143.000,00	97,51
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan	44.850.000,00	43.700.000,00	97,43

Informasi Kependudukan			
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	1.443.000,00	1.443.000,00	100
Capaian Kinerja Keuangan			97,51

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi” diukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.23
Keberhasilan Capaian Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 3

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
Belanja Langsung	2.363.029.000,00	1.917.210.401,00	81,13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.818.991.400,00	1.399.190.024,00	76,92
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	0,00	0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	125.500.000,00	108.858.298,00	86,73
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.930.000,00	2.280.500,00	58,02
Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.262.000,00	131.313.326,00	93,62
Penyediaan jasa kebersihan kantor	72.768.000,00	52.512.900,00	72,16
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.470.000,00	16.470.000,00	100
Penyediaan alat tulis kantor	538.048.000,00	263.902.000,00	49,04
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	149.480.000,00	148.730.000,00	99,49
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.450.000,00	3.450.000,00	100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	424.073.400,00	328.163.000,00	77,38
Penyediaan makanan dan minuman	3.460.000,00	3.460.000,00	100
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	340.050.000,00	340.050.000,00	100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336.257.600,00	329.106.348,00	97,87
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	125.000.000,00	121.100.000,00	96,88
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	161.197.600,00	159.250.000,00	98,79
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.500.000,00	34.282.698,00	96,57
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.560.000,00	14.473.650,00	99,41
Program peningkatan disiplin aparatur	46.780.000,00	46.230.000,00	98,82
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	23.680.000,00	23.550.000,00	99,45
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.100.000,00	22.680.000,00	98,18



Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	161.000.000,00	142.684.029,00	88,62
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	161.000.000,00	142.684.029,00	88,62
Capaian Kinerja Keuangan			81,13

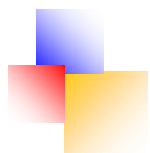
4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah*” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.24
Keberhasilan Capaian Target dan Realisasi Keuangan Sasaran 4

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4
Belanja Langsung	8.000.000,00	7.147.741,00	89,35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.000.000,00	7.147.741,00	89,35
Penyusunan laporan keuangan semesteran	240.000,00	240.000,00	100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.760.000,00	6.907.741,00	89,02
Capaian Kinerja Keuangan			89,35

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 4 (empat) sasaran strategis adalah **Rp. 2.790.369.000,00** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 2.321.154.965,00** atau **83,18%** yang berarti masuk dalam kategori capaian “Tinggi”. Dari data 9 (sembilan) program diatas, semua program terdapat indikator sasaran yang realisasi capaian kinerja keuangannya belum dapat terlaksana sepenuhnya meliputi :

1. Program Pendataan dan Informasi Kependudukan anggaran sebesar Rp. 70.758.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.70.750.000,00 (99,98%).
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.38.605.000,00 (98,98%).
3. Program Peningkatan disiplin aparatur anggaran sebesar Rp. 46.780.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.46.230.000,00 (98,82%).



4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran sebesar Rp. 336.257.600,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.329.106.348,00 (97,87%).
5. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Penduduk dengan anggaran sebesar Rp.46.293.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 45.143.000,00 (97,51%).
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.263.289.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.242.298.823,00 (92,02%).
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.147.741,00 (89,35%)
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.161.000.000,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.142.684.029,00 (88,62%).
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.1.818.991.400,00 realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.399.190.024,00 (76,92%).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Analisis Pencapaian Sasaran Strategis yaitu Terpenuhinya Hak-Hak Sipil Penduduk Dibidang Administrasi Kependudukan sebesar 96,13 % dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan sebesar 88,41 % sedang Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 83,18 % pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2019. Dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat telah berhasil melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 4 (empat) indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja sangat tinggi, $91 \% \leq 100 \%$ sebanyak 1 (satu) sasaran kinerja yaitu: Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan indikator yaitu Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur, Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Tingkat Kepatuhan Aparatur, Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya)
2. Nilai kinerja tinggi, $76 \% \leq 90 \%$ sebanyak 2 (dua) sasaran kinerja yaitu: Terpenuhinya hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan (indikator kinerja yaitu Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (KTP el), Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran) dan Rasio Jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri) dan



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dibidang Kependudukan dengan indicator kinerja yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)

3. Nilai kinerja sedang, $66 \% \leq 75 \%$ sebanyak 1 (satu) sasaran kinerja yaitu: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah dengan indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
4. Nilai kinerja rendah, kurang dari $51 \% \leq 65 \%$ sebanyak 0 (nol) indikator kinerja
5. Nilai kinerja sangat rendah $\leq 50 \%$ sebanyak 0 (nol) indikator kinerja

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2019. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2019 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan baik, namun demikian pada hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) belum sesuai target yang diharapkan namun ada beberapa capaian keberhasilan pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tabel kinerja output dan outcome adalah:

- 1) Pengembangan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dilakukan pembersihan data ganda antara data SIAK kabupaten/kota dan perekaman biometrik KTP elektronik untuk mendapatkan data yang akurat pemilih untuk pemilu tahun 2019;
- 2) Rasio jumlah penduduk yang terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Data Agregat Kependudukan (DAK) Kemendagri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Rasio ini sebagai gambaran pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang memiliki data akurat sehingga



mendekati data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun pada kenyataannya target yang telah ditentukan tidak tercapai karena penambahan penduduk pada DAK Sem diikuti juga penambahan penduduk pada SIAK.

- 3) Penyusunan kebijakan kependudukan, dengan dilaksanakannya rapat koordinasi, dengan keputusan perlunya memperkuat mekanisme pencatatan peristiwa penting dan pencatatan sipil agar kualitas database kependudukan (SIAK) semakin baik dan validasi serta ketunggalan data yang semakin akurat.

Hambatan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang terampil dalam mengelola keuangan belum memadai.
 - b. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan masih kurang.
 - c. Jumlah pegawai untuk pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan masih kurang dan.
 - d. Pencatat buku register akta Pencatatan Sipil masih kurang.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki;
3. Masih terdapat masyarakat yang enggan mengurus KTP el, KK dan Akta Pencatatan Sipil terutama akta kelahiran sebelum benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat melaporkannya sehingga dikhawatirkan adanya manipulasi data;
4. Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan;
5. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk perangkat KTP-el sudah kurang optimal karena merupakan hasil pengadaan tahun 2011 dari pemerintah pusat sehingga terhambatnya proses penyelesaian pencetakan KTP el;
6. Belum tersedianya petugas registrasi untuk administrasi kependudukan (akta capil) pada seluruh desa, karena keterbatasan pagu indikatif yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tiap tahunnya.



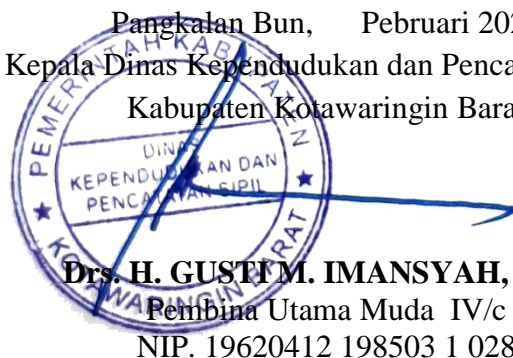
Guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki strategi pemecahan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada secara maksimal, serta mengikut sertakan dalam bimbingan teknis keuangan dan Diklat/Pelatihan mengenai administrasi kependudukan;
2. Meningkatkan sosialisasi akan pelayanan dokumen kependudukan ke Kecamatan, Desa/Kelurahan, agar cakupan layanan masyarakat meluas;
3. Berusaha mengusulkan penambahan personil melalui instansi yang berwenang serta terus berkoordinasi dengan kecamatan agar tidak memindahkan tenaga pengelola SIAK (operator kecamatan) yang sudah pernah mengikuti pelatihan SIAK;
4. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran data base kependudukan untuk berbagai kepentingan;
5. Mempergunakan sarana dan prasarana pendukung SIAK yang ada semaksimal mungkin baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten;

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan serta berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalan Bun, Pebruari 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620412 198503 1 028